

Hubungan Pelatihan Kewirausahaan, Akses Modal, dan Peran Pemerintah terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan Pelaku UMKM

Intan^{1*}, Fatih Fuadi², Dimas Pratomo³

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Intanayuni354@gmail.com^{1*}, fatihfuadi@radenintan.ac.id², dimaspratomo@radenintan.ac.id³

Received 23 November 2025 | Revised 25 November 2025 | Accepted 30 November 2025

*Korespondensi Penulis

Abstract

Women's economic independence is a crucial element in improving family welfare and promoting inclusive economic development. However, efforts to strengthen this independence are often hindered by limited entrepreneurial skills, restricted access to capital, and the inadequate effectiveness of government support programs. This study aims to analyze the influence of Entrepreneurial Training, Access to Capital, and Government Role on Women's Economic Independence, both partially and simultaneously. Using a quantitative method with a survey approach, the research involved 106 respondents selected from a population of 218 female entrepreneurs using the Slovin formula. Data were analyzed using Partial Least Square (PLS), with instruments that had been tested for validity and reliability. The results show that Entrepreneurial Training and Access to Capital have a positive and significant effect on Women's Economic Independence, whereas the Government Role does not have a significant effect, although the direction is positive. Simultaneously, the three variables were found to have a significant effect. These findings highlight that enhancing entrepreneurial competence and facilitating access to capital are key factors in promoting women's financial independence, while the government's role needs to be strengthened to ensure more effective and well-targeted support.

Keywords: Entrepreneurship Training; Access To Capital; Government Support; Economic Independence; Women MSME

Abstrak

Kemandirian ekonomi perempuan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendorong pembangunan inklusif. Namun, upaya penguatan kemandirian ini masih terhambat oleh keterbatasan keterampilan usaha, akses modal, dan kurang optimalnya dukungan pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pelatihan Kewirausahaan, Akses Modal, dan Peran Pemerintah terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan secara parsial maupun simultan. Menggunakan metode kuantitatif dengan survei terhadap 106 responden dari populasi 218 perempuan pelaku usaha, data dianalisis melalui PLS dengan instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelatihan Kewirausahaan dan Akses Permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan, sedangkan Peran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan meskipun bernilai positif. Secara simultan, ketiga variabel terbukti berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi usaha dan akses pendanaan sebagai faktor utama kemandirian ekonomi perempuan, serta perlunya penguatan peran pemerintah agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata kunci: Pelatihan Kewirausahaan; Akses Modal; Dukungan Pemerintah; Kemandirian Ekonomi; UMKM Perempuan



PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja (Hartarto, 2022). Perkembangan UMKM ini tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menyerap lapangan kerja dalam jumlah besar karena karakter usaha yang berskala mikro dan komunitas (Hartarto, 2022). Namun, meskipun jumlah UMKM sangat banyak, banyak dari usaha tersebut dikelola oleh kelompok rentan seperti perempuan, termasuk ibu rumah tangga, yang menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses sumber daya ekonomi. Permasalahan utama yang dihadapi oleh perempuan pelaku UMKM meliputi keterbatasan kapasitas kewirausahaan, akses permodalan yang belum merata, dan keterbatasan dukungan pemerintah (Anwar Muhammad Foundation, 2025). Hambatan-hambatan struktural dan nonstruktural ini dapat menghambat kemandirian ekonomi perempuan, padahal potensi pemberdayaan perempuan melalui UMKM sangat besar untuk mendorong pemerataan ekonomi dan inklusi sosial (Setneg, 2025). UMKM memiliki pengaruh terhadap perekonomian karena membantu mempertahankan stabilitas ekonomi dan mengembangkan perekonomian. UMKM memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan meningkatkan lapangan kerja (Bakrie 2024). UMKM memberikan dampak sosial, terutama dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan inklusi finansial. Dengan mendorong perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, UMKM juga membuka pasar internasional sehingga menciptakan pasar baru (Hapsari et al., 2024). Berdasarkan (data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023), sektor UMKM terus berkembang dengan mencapai 65.5 juta unit usaha, menyerap lebih dari 97% tenaga kerja Indonesia, berkontribusi sebesar 61% atau Rp9.580 triliun, terhadap PDB, serta menyumbang 15% ekspor nasional. Perkembangan UMKM tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga terlihat di

berbagai daerah, termasuk di Kota Bandar Lampung yang terus berkembang.

UMKM yang dikelola perempuan di Indonesia menunjukkan potensi besar sebagai sarana pemberdayaan ekonomi, namun menghadapi berbagai hambatan struktural dan finansial yang menghambat kemandirian ekonomi. Studi sistematis oleh (Maya et al, 2023) menemukan bahwa perempuan pengusaha masih menghadapi kendala akses modal, norma budaya, serta hambatan partisipatif dalam kewirausahaan, yang menggerus efektivitas program pemberdayaan ekonomi perempuan. Selain itu, penelitian oleh (Setiawati, 2020) pada komunitas MSME lokal menunjukkan bahwa salah satu faktor dominan penghambat pertumbuhan usaha perempuan adalah kurangnya jaringan ke lembaga keuangan, rendahnya pengalaman bisnis, dan keterbatasan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, keterbatasan akses Modal menjadi tantangan utama yang memperlambat pertumbuhan usaha perempuan. (Agustin, et al, 2024) menemukan bahwa perempuan pelaku UMKM sering menghadapi hambatan dalam memperoleh pendanaan karena rendahnya literasi keuangan dan kurangnya jaringan ke lembaga pembiayaan. Kondisi ini sejalan dengan studi (Rahayu et al, 2025) yang mengungkap bahwa pelaku UMKM perempuan masih memiliki akses terbatas terhadap modal dan teknologi digital sehingga mempengaruhi kemampuan ekspansi usaha. Pemilihan perempuan sebagai fokus penelitian didasarkan pada bukti bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dalam mengembangkan usaha dan mencapai kemandirian ekonomi (UN Women Gender Finance Booklet,2023). Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa jutaan perempuan wirausaha mengalami keterbatasan akses modal, pelatihan, dan dukungan kelembagaan, sehingga peluang ekonominya tertinggal dibanding laki-laki. Di Indonesia, data ketenagakerjaan juga menunjukkan adanya kesenjangan partisipasi dan akses sumber daya ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, penggunaan perspektif gender penting untuk memahami bagaimana norma sosial, peran domestik, dan bias institusi mempengaruhi kemampuan perempuan dalam



memanfaatkan pelatihan, memperoleh modal, dan mengakses program pemerintah (*OECD Bridging the Finance Gap for Women Entrepreneurs*, 2023). Dengan memakai perspektif ini, penelitian dapat memberikan analisis yang lebih akurat tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian ekonomi perempuan serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa pelatihan kewirausahaan, akses modal, dan peran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemandirian ekonomi perempuan, sementara penelitian lainnya menemukan pengaruh yang lemah atau bahkan tidak signifikan. Ketidakkonsistenan hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut masih perlu diuji kembali, terutama dalam konteks perempuan pelaku UMKM di wilayah urban. Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara eksplisit memasukkan perspektif *gender-based empowerment*. Banyak studi hanya menilai aspek ekonomi secara umum tanpa mempertimbangkan hambatan struktural gender seperti beban domestik, keterbatasan akses informasi, dan posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Padahal, konteks pemberdayaan berbasis gender sangat penting untuk memahami bagaimana perempuan dapat mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi gap riset berupa inkonsistensi temuan empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian ekonomi perempuan, dan minimnya studi yang menggunakan perspektif pemberdayaan berbasis gender dalam menganalisis kemandirian ekonomi perempuan pelaku UMKM di wilayah urban.

Di tingkat lokal, khususnya kota bandar lampung, dinas koperasi dan ukm melaporkan bahwa lebih dari 38% pelaku umkm perempuan adalah ibu rumah tangga yang belum mencapai kemandirian usaha secara optimal (*diskop ukm lampung*, 2023). di kecamatan kemiling, terdapat lebih dari 100 perempuan pelaku umkm skala mikro yang menjalankan usaha dari rumah (data kecamatan kemiling, 2024), namun

sebagian besar belum memiliki pelatihan formal, sulit mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan, dan kurang mendapat pendampingan dari pemerintah setempat. (Amartya Sen, 2020), Hal ini memperkuat asumsi bahwa intervensi dari aspek pelatihan, permodalan, dan peran pemerintah belum optimal mendorong kemandirian ekonomi perempuan di wilayah ini. Solusi yang umum ditawarkan untuk masalah ini yaitu peningkatan pelatihan kewirausahaan berbasis praktik, fasilitasi akses permodalan melalui skema pembiayaan mikro, serta penguatan kebijakan dan program pemberdayaan dari pemerintah daerah. Sayangnya, pelaksanaan solusi ini masih belum efektif karena keterbatasan anggaran, rendahnya sinergi antar-lembaga, dan minimnya monitoring keberlanjutan program. Banyak pelatihan bersifat satu arah, tidak kontekstual dengan kebutuhan lokal, serta tidak diikuti oleh pendampingan usaha yang berkelanjutan. Pemilihan Kecamatan Kemiling sebagai lokasi penelitian dilakukan secara objektif karena wilayah ini memiliki konsentrasi ibu rumah tangga pelaku UMKM yang cukup tinggi, namun juga menunjukkan gejala keterbatasan dalam aspek pelatihan, akses modal, dan intervensi pemerintah. Studi pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara dengan sepuluh pelaku UMKM setempat menunjukkan bahwa 80% belum pernah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dari pemerintah, 7 dari 10 responden mengalami penolakan dalam pengajuan pinjaman modal, dan tidak mengetahui program pemberdayaan yang sedang berjalan (Izzah et al., 2022). Fakta ini memperkuat urgensi dan relevansi penelitian dilakukan di lokasi tersebut guna mendapatkan gambaran empiris yang lebih utuh dan akurat. (Rafiah, 2021) Pelatihan kewirausahaan merupakan intervensi penting untuk meningkatkan kapabilitas pelaku UMKM melalui pembentukan human capital dan peningkatan *entrepreneurial self-efficacy*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan kewirausahaan, akses modal, dan dukungan pemerintah terhadap kemandirian ekonomi perempuan pelaku UMKM, dengan fokus pada peningkatan kapasitas usaha dan



kemampuan pengambilan keputusan finansial secara mandiri. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana ketiga faktor tersebut memengaruhi kemandirian ekonomi ibu rumah tangga pelaku UMKM di wilayah urban khusus kecamatan kemiling kota bandar lampung. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung peningkatan pendapatan dan stabilitas usaha perempuan, sekaligus mengungkap hambatan struktural seperti keterbatasan literasi keuangan dan akses pendanaan formal (Nasution et al., 2024). Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis gender melalui penguatan ekosistem UMKM, sedangkan secara praktis penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan lembaga keuangan untuk penguatan program pemberdayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi perempuan pelaku UMKM (Suryani & Rahayu, 2023)

Kajian Teori

Kerangka teori penelitian ini menjelaskan bahwa pelatihan kewirausahaan, akses modal, dan peran pemerintah merupakan faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian ekonomi perempuan pelaku UMKM. Pelatihan kewirausahaan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan manajerial usaha. Akses modal menyediakan sumber daya finansial yang diperlukan untuk peningkatan kapasitas, inovasi, dan keberlanjutan usaha. Peran pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator melalui kebijakan pendukung, pelatihan, digitalisasi, serta program pembiayaan seperti KUR. Secara teoretis, ketiga variabel independen tersebut berperan dalam meningkatkan pendapatan, kapasitas kontrol atas aset, dan kemampuan pengambilan keputusan ekonomi sehingga berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi perempuan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan Pelatihan Kewirausahaan (X1), Akses Permodalan (X2), dan Peran Pemerintah (X3) sebagai variabel bebas yang diasumsikan memiliki pengaruh positif baik

secara parsial maupun simultan terhadap Kemandirian Ekonomi (Y).

Human Capital Theory (Becker, 1964) & Entrepreneurial Self-Efficacy Theory (Bandura, 1997)

Menyatakan bahwa peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi melalui pendidikan atau pelatihan adalah bentuk investasi sumber daya manusia yang akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Pelatihan meningkatkan human capital sehingga perempuan lebih kompeten mengelola usaha dan menghasilkan pendapatan sendiri. Dalam konteks UMKM perempuan, pelatihan kewirausahaan meningkatkan kemampuan seperti manajemen usaha, digital marketing, inovasi produk, literasi keuangan. Sehingga pelatihan menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas usaha dan pendapatan mandiri. Semakin baik pelatihan yang diterima perempuan pelaku UMKM, semakin tinggi kemampuan mengelola usaha, sehingga memperkuat kemandirian ekonomi. Pelatihan kewirausahaan merupakan proses terstruktur yang bertujuan untuk menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (mindset) yang krusial untuk mendirikan dan mengelola usaha baru. Menurut (Gibb 1996), pelatihan ini tidak hanya fokus pada fungsi bisnis (seperti pemasaran atau keuangan), tetapi lebih penting lagi pada pengembangan pribadi seperti kepercayaan diri, kreativitas, dan pengambilan risiko yang terukur. Dengan kata lain, pelatihan membantu individu mengenali peluang seperti yang ditekankan oleh (Shane & Venkataraman, 2000) dan menyediakan kerangka kerja untuk mengelola bisnis secara efektif, sehingga mempercepat pembelajaran dan mengurangi potensi kegagalan

Resource-Based View (RBV) (Barney, 1991) & Financial Access Theory

Menjelaskan bahwa keunggulan usaha bergantung pada akses terhadap sumber daya strategis, termasuk modal finansial. Modal memberikan kemampuan bagi UMKM untuk menambah stok dan kapasitas produksi, memperluas pasar, investasi teknologi, meningkatkan pendapatan usaha. Dalam konteks perempuan pelaku UMKM,



akses modal dapat berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, modal hibah/inkubasi. Semakin mudah akses modal yang dimiliki perempuan, semakin besar kemampuan mengembangkan usaha dan mencapai kemandirian finansial tanpa bergantung pada pihak lain. Akses permodalan merupakan kemampuan penting bagi pengusaha untuk mendapatkan modal (baik dari bank maupun investor) agar bisnis mereka bisa didirikan, bertahan, dan berkembang. menurut (Berger dan Udell, 2006) bahwa masalah utama bagi UMKM adalah tidak memiliki jaminan yang cukup atau catatan keuangan yang lengkap, membuat bank ragu untuk percaya yang menyebabkan lembaga keuangan formal enggan menyalurkan pinjaman, sehingga UMKM terpaksa mengandalkan modal internal atau pembiayaan non-formal. Selain itu, (Petersen dan Rajan, 1994) menekankan pentingnya hubungan bank-klien yang erat (relationship lending) sebagai mekanisme untuk mengurangi risiko informasi dan meningkatkan akses kredit bagi usaha kecil yang memiliki rekam jejak keuangan terbatas. Dengan demikian, peningkatan akses permodalan memerlukan tidak hanya ketersediaan dana, tetapi juga upaya untuk memperkuat kredibilitas usaha dan memperbaiki infrastruktur informasi keuangan.

Public Policy Theory & Developmental State Theory

Kebijakan publik menekankan bahwa pemerintah memiliki fungsi sebagai, Regulator membuat regulasi dan perlindungan usaha, Fasilitator menyediakan pelatihan, pendampingan, infrastruktur, dan Katalisator membuka akses modal, pasar, dan digitalisasi. Dalam konteks UMKM perempuan, peran pemerintah mencakup program KUR UMKM, pelatihan Dinas Koperasi & UMKM, pemasaran digital (GoUMKM, Bangga Buatan Indonesia), legalitas usaha (NIB, PIRT, Halal). Peran pemerintah dapat meningkatkan kapasitas UMKM dengan kebijakan, bantuan modal, dan pendampingan, sehingga berdampak positif pada kemandirian ekonomi perempuan. Peran pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang mendukung agar bisnis mudah berdiri dan tumbuh,

bertindak sebagai pembuat aturan (regulator), penyedia modal ringan (fasilitator finansial seperti KUR), dan pengembang fasilitas dasar (infrastruktur). Menurut (Baumol, 1990), peran krusial pemerintah adalah memastikan insentif yang diberikan tepat sehingga energi wirausaha diarahkan pada aktivitas produktif yang benar-benar menciptakan nilai dan pekerjaan, karena hal ini adalah kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Women's Economic Empowerment Theory (WEE)

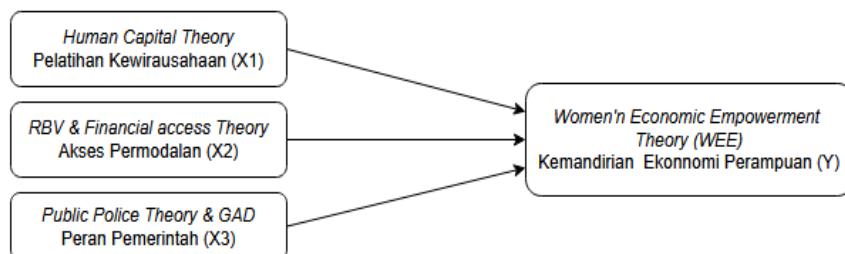
Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*) yang menekankan bahwa kemandirian ekonomi perempuan adalah hasil dari proses multidimensi di mana perempuan memperoleh kontrol yang lebih besar atas kehidupan mereka, khususnya dalam konteks ekonomi, melalui peningkatan kapasitas bertindak (agency) dan akses terhadap sumber daya (seperti modal dan pelatihan), yang didukung oleh perubahan struktural dan kebijakan yang kondusif dari peran pemerintah. Teori ini memandang pemberdayaan sebagai upaya individu dan kolektif untuk bertransisi dari posisi ketidakberdayaan atau ketidaksetaraan menjadi memiliki kemampuan untuk membuat pilihan strategis dan mencapai hasil yang diinginkan, yang secara spesifik diukur dalam konteks kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi perempuan adalah ketika seorang perempuan memiliki kendali penuh atas uang dan asetnya sendiri seperti bisa mencari penghasilan, memutuskan cara membelanjakannya, dan ikut bernegosiasi dalam keputusan keuangan keluarga. Hal ini berarti memiliki kebebasan finansial dan tidak bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Peneliti terkenal seperti (Amartya Sen 1999) melihat kemandirian ini sebagai hal yang sangat penting karena memberi perempuan kekuatan untuk bertindak dan memilih (agency), yang tidak hanya memperbaiki hidup mereka dan anak-anaknya, tetapi juga menjadi dorongan kuat bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang digunakan memiliki hipotesis yaitu menurut (Amelia Fitri Agustin, 2021)



menjelaskan bahwa pada penelitiannya Program Pelatihan Kewirausahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemandirian Ekonomi Perempuan, sedangkan menurut, (Rizky Hidayat Almuzakir, 2022) pelatihan Program Pelatihan Kewirausahaan dengan hasil signifikasi yaitu 0,298 yang berarti pelatihan pelatihan kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap kemandirian ekonomi perempuan. Menyatakan bahwa H1 Pelatihan Kewirausahaan Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan. Lalu menurut (Ade Novalina & Rusiadi, 2018) menjelaskan bahwa pada penelitiannya Akses Permodalan menunjukkan Hasil Penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kemandirian Ekonomi Perempuan, sedangkan menurut (Ahmad Hamdani, 2024) Akses Modal dengan hasil penelitian ini menunjukkan Akses Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap kemandirian ekonomi perempuan. Menyatakan bahwa H2 Akses Modal Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan. Lalu menurut (Miar (2024) bahwa pada penelitiannya Peran Pemerintah menunjukkan Hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ke-

mandirian Ekonomi Perempuan, dan menurut, (Nurlela & Haryono, S. 2022) Peran Pemerintah dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah kurang berpengaruh signifikan terhadap terhadap kemandirian ekonomi perempuan. Menyatakan bahwa H3 Peran Pemerintah Tidak Berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan. Pada penelitian (Amelia Fitri Agustin, 2021) menjelaskan bahwa pada penelitiannya Program Pelatihan Kewirausahaan memiliki pengaruh Positif dan signifikan terhadap peningkatan kemandirian Ekonomi Perempuan, pada penelitian (Ade Novalina & Rusiadi, 2018) menjelaskan bahwa pada penelitiannya Akses Permodalan menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kemandirian Ekonomi Perempuan. Lalu pada penelitian (Nurlela & Haryono, S. 2022) Peran Pemerintah dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah kurang berpengaruh signifikan terhadap terhadap kemandirian ekonomi perempuan. berdasarkan hasil penelitian diatas maka, H4 Pelatihan Kewirausahaan, Akses Permodal-an, dan Peran Pemerintah Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan. berikut gambar model kerangka teori:



Gambar 1. Model Kerangka Teori Koseptual (Diagram)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai untuk menguji hipotesis dan menganalisis hubungan antar variabel secara statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah Perempuan pelaku UMKM yang merupakan ibu rumah tangga di wilayah urban, khususnya di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Dipilih karna didasarkan pada fakta bahwa

kelompok ini merupakan salah satu segmen perempuan yang paling rentan secara ekonomi namun memiliki potensi besar untuk diberdayakan, untuk penentuan Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan hasil akhir sebanyak 106 responden. Proses dan pengolahan data menggunakan aplikasi Smart PLS4. Teknik pengumpulan menggunakan data primer dilakukan melalui kuesioner yang disebarluaskan secara langsung dan daring. Instrumen penelitian disusun berdasarkan

indikator variabel Pelatihan Kewirausahaan, Akses Modal, Peran Pemerintah dan Kemandirian Ekonomi Perempuan yang diukur menggunakan skala Likert 1-5.

Tabel 1. Indikator

No	Variabel	Indikator	Pernyataan
1. Kewirausahaan (X1)		1. Akses dan Partisipasi dalam Pelatihan	Pernyataan 1 (lampiran) Pernyataan 2 (lampiran)
		2. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	Pernyataan 3 (lampiran) Pernyataan 4 (lampiran)
		3. Relevansi Materi Pelatihan	Pernyataan 5 (lampiran) Pernyataan 6 (lampiran)
		4. Dampak Terhadap Kinerja Usaha	Pernyataan 7 (lampiran)
2. Akses Modal (X2)		1. Sumber Modal Usaha	Pernyataan 1 (lampiran)
		2. Kemudahan Prosedur pengajuan Modal	Pernyataan 2 (lampiran)
		3. Kelayakan dan Persyaratan pembiayaan	Pernyataan 3 (lampiran)
		4. Pemanfaatan modal pinjaman	Pernyataan 4 (lampiran)
3. Peran Pemerintah (X3)		5. Beban Bunga pinjaman	Pernyataan 5 (lampiran)
		1. Kunjungan dan Monitoring Usaha	Pernyataan 1 (lampiran) Pernyataan 2 (lampiran)
		2. Pendampingan Pemerintah	Pernyataan 3 (lampiran) Pernyataan 4 (lampiran)
		3. Program Pemerintah untuk Pengembangan Usaha	Pernyataan 5 (lampiran)
4. Kemandirian Ekonomi Perempuan (Y)		4. Dukungan Permodalan dari Pemerintah	Pernyataan 6 (lampiran)
		5. Edukasi dan Pelatihan dari Pemerintah	Pernyataan 7 (lampiran) Pernyataan 8 (lampiran)
		1. Kontribusi terhadap Ekonomi Keluarga	Pernyataan 1 (lampiran) Pernyataan 2 (lampiran)
		2. Kemandirian dalam Pengelolaan Usaha	Pernyataan 3 (lampiran) Pernyataan 4 (lampiran) Pernyataan 5 (lampiran)
		3. Dampak Program Pemerintah terhadap Kemandirian	Pernyataan 6 (lampiran)
		4. Inisiatif dan Pengembangan Usaha	Pernyataan 7 (lampiran)
		5. Kemandirian dalam Pendapatan	Pernyataan 8 (lampiran) Pernyataan 9 (lampiran) Pernyataan 10 (lampiran)

Analisis data menggunakan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu pengujian model pengukuran (outer model) untuk menilai validitas dan reliabilitas instrumen, serta pengujian model struktural (inner model) untuk menganalisis hubungan antarvariabel dan menguji hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji Validitas, uji Reabilitas, uji Koefisien Determinasi (R^2), uji

Regresi Liner Berganda, uji T (Uji Parsial), uji F (Simultan), dan uji Asumsi Klasik.

HASIL dan PEMBAHASAN

Uji Validitas

Dalam penelitian ini digunakan nilai outer loading dengan kriteria $>0,600$

Tabel 2. Loading Factor

X1	X2	X3	Y	Hasil
0.651	0.683	0.811	0.666	Valid
0.788	0.739	0.780	0.723	Valid
0.788	0.803	0.792	0.799	Valid
0.714	0.800	0.748	0.724	Valid



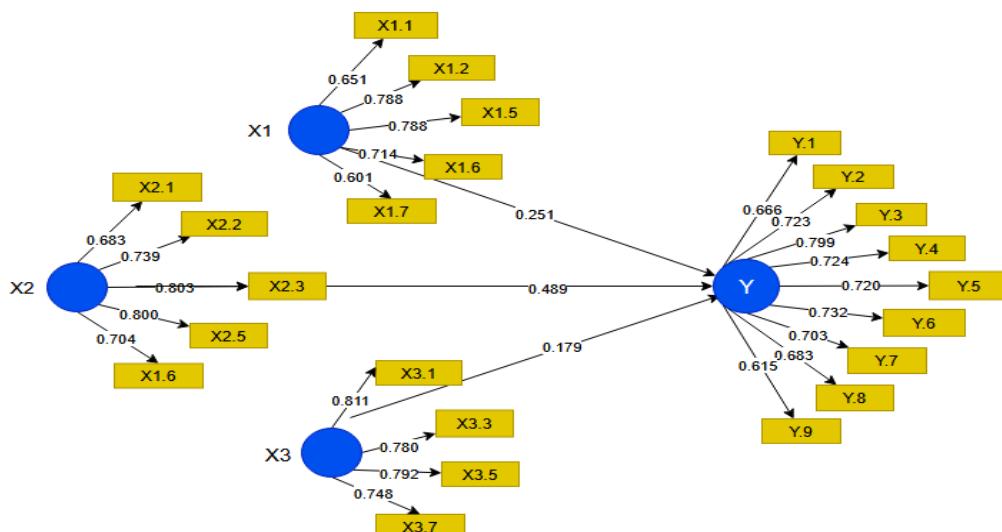
X1	X2	X3	Y	Hasil
0.601	0.704		0.720	Valid
			0.732	Valid
			0.703	Valid
			0.683	Valid
			0.615	Valid

Sumber: Pengolahan uji validitas SmartPLS 4

Berdasarkan data di atas, karena nilai outer loading melebihi 0,6, maka semua item dinyatakan valid. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan pendekatan nilai t-hitung dan t-tabel, seluruh indikator

memiliki nilai t-hitung > 1.96, Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator berpengaruh secara signifikan terhadap konstruknya masing-masing, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid dan layak digunakan dalam model penelitian selanjutnya.

Berikut ini adalah hasil uji validitas menggunakan alat bantu software Smart PLS 4:



Gambar 2. Hasil Uji Validitas variable X1,X2,X3 dan Y menggunakan aplikasi SmartPLS4

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Cronbach's Alpha dan AVE

Variabel	Cronbach's alpha	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
X1	0.755	0.507
X2	0.801	0.559
X3	0.790	0.613
Y	0.875	0.502

Sumber data : Pengolahan data Uji reliabilitas diolah SmartPLS 4

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa nilai Cronbach's Alpha pada variable independen dan dependen lebih dari 0,7. Hal ini menunjukkan semua variable independen dan dependen dinyatakan reliable. Selain itu nilai Avarage Variance Extracted (AVE) untuk masing masing konstruk juga lebih dari 0,5. Dengan demikian semua variable dinyatakan reliabel.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Semakin besar nilai R^2 , semakin tinggi persentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel inde-

penden (X). Sebaliknya, jika nilai R^2 kecil, maka persentase perubahan variable dependen (Y) yang dipengaruhi oleh variabel independen (X) juga rendah.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel	R- Square	Adjusted R- Square
Y	0.697	0.688

Sumber data : Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2 menggunakan SmartPLS4

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada table diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar 69,7% yang artinya moderat (kuat) sedangkan sisanya, yaitu 30,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model atau variabel-variabel bebas yang tidak diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa variable Pelatihan Kewirausahaan (X1) Akses Permodalan (X2) dan Peran Pemerintah (X3) mampu memberikan penjelasan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan (Y). Sedangkan Adjusted R-Square menunjukkan varieable Pelatihan



Kewirausahaan (X1) Akses Permodalan (X2) dan Peran Pemerintah (X3) mampu memberikan penjelasan terhadap

Kemandirian Ekonomi Perempuan (Y) sebesar 68,8% yang artinya kuat.

Uji T (Uji Parsial)

Tabel 5. Hasil Uji T (Parsial)

Variabel	Sampel asli (0)	Rata-rata sampel (M)	Sampel Standar deviasi (STDEV)	T statistik	P Values
X1 > Y	0.251	0.266	0.143	1.748	0.040
X2 > Y	0.489	0.459	0.140	3.500	0.000
X3 > Y	0.179	0.203	0.118	1.513	0.065

Sumber data: hasil olah data Uji T (Parsial) menggunakan SmartPLS4

Berdasarkan hasil pengujian di atas:

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Pelatihan Kewirausahaan diduga memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai p-value sebesar 0.040 (lebih kecil dari 0.05) dan T-statistik sebesar 1.748 (lebih besar dari 1.96). Dengan demikian, H1 diterima, yang berarti bahwa Pelatihan Kewirausahaan terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap

Kemandirian Ekonomi Perempuan. Hipotesis kedua menyatakan bahwa Akses Permodalan diduga berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan. Dari hasil pengujian, diperoleh p-value

sebesar 0,000 (< 0.05) dan T-statistik sebesar 3.500 (> 1.96). Oleh karena itu, H2 diterima, yang menunjukkan bahwa Akses Permodalan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Peran Pemerintah diduga memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan. Hasil analisis menunjukkan p-value sebesar 0.065 (< 0.05) dan T-statistik sebesar 1.513 (Kurang dari 1.96). Dengan demikian, H3 dapat ditolak, yang berarti bahwa Peran Pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan.

Uji F (Simultan)

Tabel 6. Hasil Uji F (Simultan)

	Sum square	df	Maen square	F	P Values
Total	2191.104	105	0.000	0.000	0.000
Error	738.219	102	7.237	0.000	0.000
Regression	1452.885	3	484.295	66.915	0.000

Sumber data : hasil olah data Uji F (Simultan) menggunakan SmartPLS4

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai P Value sebesar 0.000 untuk variabel Pelatihan Kewirausahaan (X1) Akses Modal (X2) dan Peran Pemerintah (X3) secara simultan, yang berarti lebih kecil dari 0.05. Selain itu, nilai Fhitung sebesar 66.915 lebih besar dibandingkan dengan F tabel sebesar 2.70, dengan nilai mean square sebesar 484.295. Berdasarkan hasil ini, sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan pada uji F, dapat disimpulkan bahwa H4 dalam penelitian ini diterima. Artinya, ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan

terhadap variabel Kemandirian Ekonomi Perempuan.

Pembahasan

Hasil penelitian bahwa Pelatihan Kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan, dengan nilai original sample sebesar 0.251, t-statistik sebesar 1.748, dan nilai p value sebesar 0.040. Artinya, bahwa semakin baik pelatihan yang diterima, semakin tinggi pula kemandirian ekonomi perempuan. Pelatihan memberikan peningkatan keterampilan usaha, kepercayaan diri, serta kemampuan mengambil ke-



putusan, sehingga membantu perempuan menjadi lebih mandiri secara finansial. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pelatihan dalam memberdayakan perempuan secara ekonomi. Pelatihan tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas manajerial, dan mendorong keberanian dalam mengambil risiko usaha. Dengan demikian, pelatihan kewirausahaan terbukti sebagai faktor penting dalam mendorong perempuan menjadi lebih mandiri secara finansial. Temuan ini memperkuat konsep *Human Capital Theory* yang menjelaskan bahwa peningkatan kemampuan, keterampilan, serta literasi bisnis akan meningkatkan produktivitas dan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha secara mandiri. Temuan ini konsisten dengan berbagai studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa pelatihan dapat meningkatkan keberhasilan usaha perempuan UMKM. Namun, beberapa penelitian lain melaporkan pengaruh yang lemah akibat pelatihan yang tidak berkelanjutan maupun tidak sesuai konteks gender. Dengan demikian, penelitian ini mengisi ketidakkonsistenan temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa dalam konteks wilayah urban, pelatihan kewirausahaan masih menjadi faktor penting yang mendorong kemandirian ekonomi perempuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akses Permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan, dengan nilai original sample sebesar 0.489, t-statistik sebesar 3.500, dan nilai p value sebesar 0.000. Artinya kemampuan perempuan untuk memperoleh modal baik melalui pinjaman, bantuan usaha, maupun fasilitas pembiayaan lain berperan langsung dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk memulai, mengembangkan, dan mempertahankan usaha dengan adanya permodalan yang memadai, perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, serta meningkatkan pendapatan. Kondisi ini pada akhirnya mendorong mereka menjadi lebih mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada pihak

lain. Temuan ini menegaskan bahwa akses permodalan merupakan faktor kunci dalam proses pemberdayaan ekonomi perempuan dan menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan *Resource-Based View* (RBV) yang menegaskan bahwa modal merupakan sumber daya utama untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas skala bisnis, dan memperkuat posisi perempuan dalam aktivitas ekonomi dikaitkan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa akses terhadap modal formal maupun informal meningkatkan omzet dan pendapatan perempuan pelaku UMKM. Namun, inkonsistensi muncul pada studi lain yang menunjukkan bahwa modal tidak berpengaruh signifikan apabila tidak dibarengi dengan kompetensi manajemen usaha. Penelitian ini memberikan perlindungan empiris bahwa akses modal tetap menjadi faktor penting dalam mendorong kemandirian ekonomi perempuan, terutama pada perempuan urban yang memiliki tantangan akses informasi dan kondisi pasar yang kompetitif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan, dengan nilai original sample sebesar 0.179, t-statistik sebesar 1.513, dan nilai p value sebesar 0.065. yang artinya, meskipun arah hubungan positif, program pemerintah belum mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kemandirian ekonomi perempuan, kemungkinan karena pelaksanaan dan relevansi program yang belum optimal. upaya atau program pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam konteks ekonomi belum mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kemandirian ekonomi perempuan. bahwa program pemerintah mungkin belum tepat sasaran, belum optimal dalam implementasi, kurang dalam sosialisasi, atau tidak sesuai dengan kebutuhan perempuan pelaku ekonomi. Selain itu, faktor lain seperti pelatihan, modal, pengalaman usaha, atau dukungan lingkungan sosial lebih dominan membentuk kemandirian ekonomi perempuan dibandingkan peran pemerintah yang ada saat ini. Temuan ini menguatkan teori



Institutional Support, yang menyatakan bahwa keberadaan kebijakan, fasilitas pelatihan, pendampingan, serta kemudahan perizinan berperan sebagai instrumen peningkatan kapasitas usaha perempuan. Penelitian terdahulu juga menemukan bahwa dukungan pemerintah seperti bantuan UMKM, pendampingan digital, dan program pemberdayaan perempuan berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian ekonomi. Namun, beberapa studi menunjukkan hasil yang berbeda ketika implementasi kebijakan tidak merata atau tidak sesuai kebutuhan perempuan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks urban, peran pemerintah tetap menjadi variabel penting karena menyediakan akses sumber daya yang tidak bisa diperoleh perempuan secara mandiri.

Berdasarkan hasil Uji F (simultan) yang diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 66.915 dengan nilai p-value sebesar 0.000. Karena nilai $p < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan signifikan. Artinya, variabel independen yang terdiri dari Pelatihan Kewirausahaan (X1) Akses Permodalan (X2) dan Peran Pemerintah (X3) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan. Dengan demikian, hipotesis simultan dalam penelitian ini diterima, yang berarti bahwa ketiga variabel bebas tersebut mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen secara signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pada aspek pelatihan, kemudahan memperoleh modal, dan keterlibatan pemerintah secara kolektif mampu mendorong terciptanya kemandirian ekonomi perempuan. Meskipun secara parsial terdapat variabel yang tidak signifikan, namun ketika diperimbangkan secara bersama, ketiganya tetap membentuk kontribusi penting dalam memperkuat kemampuan perempuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan ekonomi. Hasil ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil dari kombinasi dukungan dalam bentuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan, penyediaan akses finansial, serta dukungan kebijakan

pemerintah. Ketiganya saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberdayaan ekonomi perempuan secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian diatas menunjukkan bahwa Pelatihan Kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan pelaku UMKM. Fakta ini menunjukkan bahwa semakin baik pelatihan yang diberikan baik dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan usaha, maupun penguatan mental kewirausahaan maka semakin tinggi kemandirian ekonomi perempuan. program pelatihan harus terus ditingkatkan kualitas dan keberlanjutannya karena terbukti mampu mendorong perempuan menjadi lebih mandiri secara finansial. Pemerintah daerah perlu menyediakan pelatihan yang tersegmentasi berdasarkan kondisi perempuan urban, misalnya pelatihan digital marketing, pengelolaan keuangan rumah tangga usaha, dan manajemen waktu bagi perempuan dengan beban ganda. Pelatihan harus bersifat berkelanjutan, bukan satu kali pertemuan, serta disertai pendampingan mentor UMKM. Kedua hasil penelitian menunjukkan bahwa Akses Permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan memperoleh modal benar-benar membantu perempuan memperluas usaha, meningkatkan pendapatan, dan mengambil keputusan ekonomi secara mandiri. lembaga keuangan maupun pemerintah perlu memperluas skema pembiayaan yang mudah dijangkau perempuan, karena modal merupakan faktor kunci dalam proses pemberdayaan ekonomi. Peningkatan Akses Pembiayaan yang Lebih Ramah Perempuan. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu memperluas skema pembiayaan dengan bunga ringan dan persyaratan administrasi sederhana bagi perempuan pelaku UMKM. Pengembangan produk kredit mikro tanpa agunan dan integrasi dengan fintech perlu diperkuat agar perempuan yang tidak memiliki aset tetap tetap dapat mengakses modal. Selanjutnya hasil penelitian bahwa Peran



Pemerintah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan. Artinya, kebijakan atau program pemerintah yang berjalan saat ini belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kemandirian ekonomi perempuan. pemerintah perlu meninjau ulang efektivitas program, memperbaiki sosialisasi, serta memperkuat pendampingan agar intervensi yang diberikan benar-benar dirasakan oleh pelaku UMKM perempuan. Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi program UMKM berbasis gender melalui pusat layanan terpadu perempuan, kelurahan, dan platform digital. Program bantuan alat produksi, legalitas usaha, dan akses pasar melalui e-commerce daerah harus lebih difokuskan pada kelompok perempuan yang rentan. Kolaborasi pemerintah komunitas perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Secara simultan, Pelatihan Kewirausahaan, Akses Permodalan, dan Peran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan. Ini berarti ketiga faktor tersebut saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan. upaya meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan membutuhkan sinergi peningkatan kapasitas (pelatihan), dukungan finansial(modal),dan kebijakan struktural (pemerintah).

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan pelaku UMKM, sementara peran pemerintah belum memberikan dampak langsung yang berarti. Temuan ini memperkuat teori pemberdayaan dan *human capital* serta memberikan bukti empiris baru dalam konteks perempuan di wilayah urban. Secara praktis, hasil penelitian menjadi dasar bagi pemerintah, lembaga pelatihan, dan lembaga keuangan untuk memperbaiki program, memperluas akses modal, dan meningkatkan efektivitas pendampingan perempuan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada

pengembangan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan. Untuk memperkaya kajian pada topik ini, beberapa rekomendasi penelitian selanjutnya adalah menambahkan variabel mediasi atau moderasi, dapat digunakan untuk melihat mekanisme lebih detail pengaruh pelatihan dan permodalan terhadap kemandirian perempuan. Menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) studi kualitatif dapat menggali pengalaman perempuan terkait hambatan gender, beban kerja domestik, dan kendala akses modal yang tidak dapat terlihat melalui analisis kuantitatif, membandingkan wilayah urban dan rural penelitian selanjutnya dapat membandingkan perempuan UMKM di perkotaan dan pedesaan untuk melihat perbedaan dinamika kebijakan, akses sumber daya, serta kesempatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Munyithya, h, & Kobonyo. (2021). *barriers to women's access to finance in kenya: the role of social and institutional factors*.*international journal of entrepreneurial finance*,23,567-584.
- Haryanto, t. & suryani, a. (2022). efektivitas program pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan akses modal di kalimantan timur: studi pada program kredit mikro. *jurnal administrasi bisnis*, 10(3), 78-92.
- Kumari, R & Mishra,S. (2022). *role of government policies in enhancing women's access to entrepreneurial finance in india*. *journal of small business management*, 60(5), 1123-1140.
- Ogundipe, A.& Olanrewaju,O.(2021). *empowering women through access to finance and entrepreneurship training in nigeria*. *journal of global entrepreneurship research*,11,245-260.
- Mensah, E. K.,& Dzansi, D. Y.(2022). *financial inclusion and women's entrepreneurship in sub-saharan africa the role of government interventions*.*journal of african economies*,31,456-473.
- Purnomo, B. R., & Sari, A. K. (2022). peran program pemberdayaan ekonomi perempuan dalam meningkatkan akses modal di jawa barat: studi pada



- program kredit mikro. *jurnal studi pembangunan*, 14(1), 55–70.
- Asongu, S. A., & Odhiambo, N. M. (2021). *enhancing women's economic empowerment through financial inclusion in sub-saharan africa*. *journal of economic studies*, 48(7), 1381–1399.
- Wardani, R., & Kurniawan, D. (2023). pengaruh akses modal dan pelatihan kewirausahaan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di kalimantan selatan: studi pada umkm. *jurnal manajemen usaha kecil dan menengah*, 15(2), 78–93.
- Njoh, A. J., & Ananga, E. (2022). *social and institutional barriers to women's access to entrepreneurial capital in cameroon*. *international journal of gender and entrepreneurship*, 14(3), 301–319.
- Adom, K., & Anambane, G. (2021). *gendered access to finance: the role of micro-finance in women's entre-preneurial development in ghana*. *journal of small business and enterprise development*, 28(4), 598–615.
- Hidayati, R., & Nugroho, A. (2023). dampak pelatihan kewirausahaan dan akses modal terhadap kemandirian ekonomi perempuan di sektor umkm: studi kasus di bali. *jurnal ekonomi dan bisnis*, 29(1), 67–82.
- Okeke-Uzodike, O. E., & Naicker, V. (2022). *gendered barriers to accessing entrepreneurial finance: a south african perspective*. *south african journal of economic and management sciences*, 25.
- Lestari, D., & Arifin, Z. (2022). peran program pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan akses modal dan literasi keuangan di indonesia. *jurnal ekonomi dan bisnis islam*, 8(2), 101–118.
- mensah, j. v., & amoah, j. o. (2023). *social and cultural barriers to women's access to entrepreneurial finance in sub-saharan africa*. *gender, work & organization*, 30(3), 987–1005.
- Kumar, S., & Rao, P. (2020). gender-based constraints in accessing entre-preneurial finance: evidence from india. *international journal of entrepreneurial behavior & research*, 26(6), 1295–1312.
- Utami, R. M., & Lestari, R. (2022). peran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses modal bagi wirausaha perempuan di indonesia: studi kasus program mekaar. *jurnal kebijakan publik*, 13(1), 56–70.
- Rizkiyah, P., & Handayani, R. (2021). pemberdayaan perempuan melalui program kredit usaha rakyat (kur) di indonesia: tantangan dan peluang. *jurnal administrasi publik*, 9(3), 112–125.
- Chinomona, E., & Maziriri, E. T. (2020). faktor-faktor yang mempengaruhi akses perempuan ke modal usaha di afrika selatan: pendekatan berbasis gender. *journal of bau* 15(3), 311–319.
- Nawaz, F. (2021). hambatan sosial budaya dalam akses keuangan bagi wirausaha perempuan pakistan. *gender in management: an international journal*, 36(4), 452–468.
- Hossain, M., & Rahman, M. H. (2022). pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program mikrokredit: bukti dari bangladesh. *international journal of gender and entrepreneurship*, 14(2), 187–204.
- Panda, S. (2020). peran kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses modal bagi wirausaha perempuan di india. *journal of entrepreneurship in emerging economies*, 12(3), 389–410.
- Sari, P. K., & Santoso, A. (2022). peran pelatihan kewirausahaan dan akses modal dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di indonesia: studi kasus pada umkm di jawa timur. *jurnal manajemen dan kewirausahaan*, 24(1), 45–58.
- Minniti, M., & Naudé, W. (2020). kewirausahaan perempuan di negara berkembang: tantangan dan peluang dalam akses keuangan. *small business economics*, 55(4), 777–791.
- Fatoki, O. (2021). hambatan akses modal bagi wirausaha perempuan di afrika selatan: implikasi untuk kebijakan publik. *entrepreneurship and sustainability issues*, 8(4), 632–645.
- Tambunan, T. (2020). pemberdayaan ekonomi perempuan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah



(umkm) di indonesia: peran akses modal dan pelatihan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 145-162.